

PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI RAJA SIANTAR KE XIV SANG NAUALUH DAMANIK

Hisarma Saragih¹⁾, Jalatua Habungaran Hasugian^{2)*}, Hotman Agustinus Damanik³⁾

^{1),2)}Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Simalungun

³⁾Pegiat Sejarah dan Budaya Simalungun

*e-mail: jalhs.74@gmail.com

Abstract

This seminar discusses efforts to increase public access to historical data and information regarding the 14th King of Siantar, Sang Nauluh Damanik. He is a prominent figure in Simalungun history known for his courageous resistance to Dutch colonial penetration and domination, upholding the dignity of his people, and prioritizing the values of local wisdom. However, his work remains largely unknown, especially among the younger generation. The seminar, attended by history/social studies teachers, cross-ethnic traditional institutions, cultural activists, and the general public, aims to strengthen local historical literacy. It is hoped that this seminar will serve as a platform for enriching knowledge and fostering the recognition of Sang Nauluh as a National Hero. Using participatory methods through lectures, discussions, and questions and answers, active interaction between participants and speakers is encouraged. The results demonstrate that strengthening data through documents, archives, academic studies, and oral traditions is a crucial foundation for preserving local history. As a follow-up, it is necessary to expand public access to local historical information to enhance the capacity of history learning in schools. It also strengthens the community's collective identity and opens up opportunities for recognition of Sang Nauluh Damanik as a National Hero for his significant contributions to the nation's struggle.

Keywords: Seminar, Public Access, Sang Nauluh Damanik, National Hero

Abstrak

Seminar ini membahas upaya peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah mengenai Raja Siantar Ke XIV, Sang Nauluh Damanik. Ia merupakan tokoh penting dalam sejarah Simalungun yang dikenal berani menolak penetrasi dan dominasi kolonial Belanda; mempertahankan martabat bangsanya; serta mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Namun kiprahnya hingga kini masih kurang dikenal secara luas terutama kalangan generasi muda. Melalui Seminar yang diikuti guru-guru sejarah/IPS, lembaga adat lintas etnik, pegiat budaya, dan masyarakat umum dapat memperkuat literasi sejarah lokal. Seminar ini diharapkan menjadi media pengayaan wawasan dan dapat menjadi sarana memperjuangkan pengakuan Sang Nauluh sebagai Pahlawan Nasional. Menggunakan metode partisipatif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab, memungkinkan terjadinya interaksi aktif antar peserta dan narasumber. Hasilnya menunjukkan bahwa penguatan data melalui dokumen, arsip, kajian akademis, maupun tradisi lisan, menjadi fondasi penting dalam pelestarian sejarah lokal. Sebagai tindak lanjut, perlu memperluas akses masyarakat terhadap informasi sejarah lokal guna meningkatkan kapasitas pembelajaran sejarah di sekolah. Sekaligus pula memperkuat identitas kolektif masyarakat serta membuka peluang bagi pengakuan Sang Nauluh Damanik sebagai Pahlawan Nasional karena telah berjasa besar dalam perjuangan bangsa.

Kata Kunci: Seminar, Akses Masyarakat, Sang Nauluh Damanik, Pahlawan Nasional

PENDAHULUAN

Sejarah lokal merupakan bagian penting dari identitas bangsa, karena di dalamnya tersimpan nilai-nilai perjuangan, kearifan, dan warisan budaya yang membentuk karakter masyarakat. Salah satu

tokoh yang memiliki peran besar dalam sejarah lokal Simalungun adalah Raja Siantar Ke XIV, Sang Nauluh Damanik. Ia seorang pemimpin yang gigih melawan kolonialisme Belanda sekaligus mempertahankan kedaulatan dan identitas budaya masyarakatnya. Sayangnya hingga kini kiprah beliau belum sepenuhnya dikenal luas, bahkan di kalangan generasi muda. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pelestarian sejarah dan pengusulan beliau sebagai Pahlawan Nasional.

Sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat pemahaman sejarah lokal dan mendorong pengakuan terhadap perjuangan dan jasa Sang Nauluh Damanik, diselenggarakanlah seminar bertajuk, “Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Raja Siantar Ke XIV Sang Nauluh Damanik” pada Selasa, 5 Agustus 2025. Kegiatan ini menggunakan metode partisipatif, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi, sehingga diharapkan mampu mendorong interaksi aktif dan pertukaran gagasan di antara peserta maupun narasumber.

Peserta seminar ini berjumlah 90 orang, terdiri dari utusan guru-guru Sejarah/IPS tingkat SMP Negeri dan Swasta di Kota Pematangsiantar, perwakilan lembaga-lembaga pemangku adat dan budaya Simalungun maupun lintas etnik lainnya, para pegiat sejarah dan budaya, pengelola sanggar budaya, pengelola Museum Simalungun, dan unsur masyarakat lainnya. Keragaman latar belakang peserta diharapkan memperkaya perspektif dan memperluas jangkauan penyebaran informasi yang dihasilkan dari kegiatan ini.

Melalui seminar ini, peserta diharapkan memperoleh wawasan mendalam tentang dampak kolonialisme Belanda terhadap eksistensi Kerajaan Siantar dan perjuangan Sang Nauluh Damanik, serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memperkuat pembelajaran sejarah lokal di sekolah; meningkatkan literasi sejarah berbasis sumber yang valid; serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian warisan budaya.

Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sejarah yang komprehensif kepada guru-guru Sejarah/IPS SMP mengenai dampak kolonialisme Belanda terhadap keberadaan dan otoritas Kerajaan Siantar; peran dan perjuangan Raja Sang Nauluh Damanik dalam melawan penjajahan dan mempertahankan kedaulatan lokal; meningkatkan literasi sejarah lokal melalui pengayaan data dan informasi sejarah yang bersumber dari dokumen arsip, kajian akademik, maupun tradisi lisan yang valid; serta menggugah dukungan dan partisipasi aktif dari kalangan pendidik, lembaga adat, dan komunitas budaya.

Selain itu, seminar ini juga dimaksudkan untuk menjadikan kisah perjuangan Raja Sang Nauluh Damanik sebagai bagian dari narasi sejarah lokal di sekolah; mendorong langkah konkret menuju pengusulan kembali beliau sebagai Pahlawan Nasional; membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian sejarah dan warisan budaya lokal sebagai bagian dari jati diri bangsa yang pluralistik; serta meningkatkan sinergi antar elemen masyarakat dalam upaya pelestarian sejarah lokal dan advokasi pengakuan terhadap tokoh-tokoh lokal yang berjasa besar dalam sejarah nasional.



Gambar 1: Panitia Seminar, Kepala Dinas Pendidikan Pematangsiantar bersama Ketiga Narasumber
(dokumen panitia)

METODE

Kegiatan Seminar Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Raja Siantar Ke XIV Sang Nauluh Damanik yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka ini, menggunakan metode partisipatif, yakni ceramah materi oleh ketiga narasumber yang kemudian dipandu oleh moderator untuk berdiskusi.

Para peserta merupakan perwakilan dari Guru-guru Mata Pelajaran Sejarah atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta yang ada di Kota Pematangsiantar. Selain para guru, panitia juga mengundang pengurus Partuha Maujana Simalungun (PMS) dan lembaga cendekiawan Simalungun, para tokoh adat lintas etnik, pegiat budaya dan sanggar, serta pengelola Museum Simalungun.

Kegiatan ini dipandu oleh Kepala Seksi Kebudayaan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, didampingi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan. Kegiatan Seminar ini diharapkan bermanfaat bagi Guru-Guru Sejarah/IPS dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam mengajarkan sejarah lokal yang kontekstual dan berbasis pada data serta narasi yang valid; memperoleh materi ajar tambahan untuk memperkaya pembelajaran sejarah di tingkat SMP, terutama terkait sejarah lokal Simalungun dan tokoh perjuangan Raja Sang Nauluh Damanik; serta memperkuat jejaring antar guru dan komunitas sejarah dalam membangun kolaborasi pelestarian sejarah daerah.

Selain itu, seminar ini juga bermanfaat bagi Lembaga Adat dan Budaya dalam rangka: memperkuat posisi lembaga adat sebagai penjaga memori kolektif sejarah dan budaya masyarakat di Pematangsiantar-Simalungun; meningkatkan dokumentasi sejarah lokal, baik tertulis maupun narasi lisan, untuk edukasi dan advokasi budaya, dan mendukung proses rekonstruksi sejarah yang

objektif dan berbasis bukti dalam pengusulan gelar Pahlawan Nasional.

Sedangkan bagi Pegiat Sejarah dan Budaya, kegiatan seminar ini diharapkan menjadi ajang diseminasi hasil riset, kajian, dan dokumentasi sejarah yang selama ini dikumpulkan komunitas; memfasilitasi dialog antara narasi sejarah arus utama dengan sejarah lokal, menciptakan interpretasi yang lebih berimbang, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap urgensi pelestarian memori sejarah lokal sebagai bagian dari identitas bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan seminar diawali sejak adanya usulan perencanaan kegiatan dari Bidang Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan Dinas Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar. Usulan ini untuk menyikapi pentingnya pemahaman sejarah tentang kiprah Raja Sang Nauluh sebagai Raja Kerajaan Siantar melalui sosialisasi kepada guru-guru Sejarah/IPS SMP untuk diteruskan kepada para siswanya masing-masing di sekolah, serta masyarakat umum yang dipandang perlu mengetahui sejarah masa silam di Kerajaan Siantar, yang merupakan cikal bakal terbentuknya Kota Pematangsiantar.

Usulan kemudian berlanjut dengan penyusunan perencanaan anggaran biaya, penentuan waktu, tempat kegiatan, serta koordinasi peserta dan nara sumber. Selanjutnya, Bidang Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan membentuk kepanitiaan serta mengundang seluruh peserta dari perwakilan seluruh satuan pendidikan SMP Negeri dan Swasta dan mengundang narasumber, yakni ke Universitas Simalungun dan perwakilan kerabat Kerajaan Siantar melalui Yayasan Raja Sang Nauluh Damanik.

Kepada narasumber diinformasikan agar mempersiapkan materi seminar, membawa surat tugas dan kelengkapan lainnya demi kelancaran kegiatan seminar. Acara berlangsung sejak pagi hingga

menjelang sore hari, dibuka Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar. Dalam sambutannya, Kadis mengharapkan agar peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius serta dapat mendesiminasikan hasilnya kepada para siswa di sekolah masing-masing, maupun perwakilan tokoh masyarakat, adat agar mensosialisasikannya kepada khalayak umum.

Dengan demikian, para siswa SMP sebagai generasi penerus mendapatkan informasi yang jelas tentang siapa Raja Sang

Nauluh Damanik serta apa peran dan kontribusinya saat melawan kolonialisme Belanda. Harapannya, seluruh guru - guru dapat menindaklanjutinya di sekolah masing-masing merujuk pada informasi dan doklumen yang ada. Usai acara pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan dari nara sumber yang dipandu oleh moderator dari Dinas Pendidikan. Secara bergantian, narasumber memaparkan dan menjelaskan materinya masing-masing sesuai dengan topik yang sudah diberikan panitia.



Gambar 2: Kepala Dinas Pendidikan Pematangsiantar (tengah) bersama Ketiga Narasumber (dokumen panitia)

Data dan Sejarah Raja Siantar Ke XIV Sang Nauluh Damanik

Sang Nauluh Damanik dilahirkan pada tahun 1871 dengan nama Tuan Sangma Damanik dan wafat pada tanggal 9 Februari 1913. Ayahnya bernama Raja Mapir Damanik gelar *Raja Na i Parsiroan* merupakan Raja Ke XIII Kerajaan Siantar. Ibunya bernama Romainim boru Saragih gelar *Panakboru Gajing boru Saragih*, merupakan *Puang Bolon* Kerajaan Siantar, *panakboru* Tuan Silampuyang (Damanik 2011).

Sang Nauluh adalah putra tertua *Puang Bolon*, karena itu merupakan pewaris tahta ayahandanya menjadi Raja Siantar Ke XIV. Beliau dinobatkan menjadi raja pada tahun 1888 ketika berusia 17 tahun dan bergelar Sang Nauluh Damanik (berarti memiliki 8 kepribadian) oleh dewan kerajaan

(MD Purba 1980). Sang Nauluh memiliki 4 orang istri yakni:

1. Dorainim br Purba asal Tomuan sebagai *Puang Bona* (Ibunda Tuan Riah Kadim Damanik, wafat tanggal 12 September 1945).
2. Sorialim br Purba sebagai *Puang Marga* (Ibunda Tuan Jontiaman Damanik, wafat tahun 1929).
3. Sarmailim br Saragih sebagai *Puang Marga* (Ibunda Tuan Narudin Damanik, wafat 2 Februari 1979).
4. Romainim br Saragih sebagai *Puang Poso* dari Pamatang Silappuyang (Ibunda Tuan Sarmahata Damanik, putra mahkota yang lahir di Bengkalis tahun 1911 dan wafat 6 Februari 1966).

Raja Sang Nauluh mengambil sikap tegas untuk membebaskan rakyatnya dari penindasan Belanda dan membebaskan

wilayahnya dari berbagai eksploitasi asing. Selama masa pemerintahannya (1888-1906) beliau bersama dengan rakyat telah mengerjakan 5 (lima) proyek pembangunan di Kerajaan Siantar yaitu:

1. Membangun rumah adat di kampung Rambung Merah sebagai pusat latihan pertanian.
2. Memperlebar jalan setapak menjadi jalan raya yang dapat dilalui kereta kuda dari kota Perdagangan sampai ke Tiga Siantar. Hal ini bertujuan memperlancar arus perdagangan antara Pamatangsiantar dengan kota Perdagangan (*Sang Pang Tao*) yang akan merembes ke daerah sekitarnya yaitu "laut asin" di Pantai Timur Sumatera dan "laut tawar" (Danau Toba) di sebelah Barat.
3. Mendirikan rumah adat di kampung Naga Huta sebagai pusat pengajian agama Islam.
4. Rajin mengunjungi berbagai wilayah perkampungan untuk memeriksa dan memberi petunjuk dalam penyelesaian program kerja, dan menganjurkan rakyat untuk memotong rambut anak-anaknya serta menjaga kebersihan rumah dan wilayah perkampungan.
5. Menganjurkan rakyat untuk memelihara kuda dengan sistem *mamahan huda* yang merupakan sarana transportasi penting dan tunggangan prajurit pada zaman itu (MD Purba 1980).

Raja Sang Naualuh mempunyai kepribadian yang arif dan bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepribadian tersebut tercermin dalam sifat-sifat yang arif dan bijaksana dengan 8 (delapan) sifat kepribadian yang dimilikinya yaitu: Pengasih, pelayan, jujur, berani, bertanggungjawab, teguh pendirian, saling menghormati, dan saling membangun (Damanik 2011).

Kepada setiap warga diwajibkan memiliki keterampilan yang harus dikuasai oleh seseorang laki-laki dewasa, sebagai modal untuk berumah tangga. Keterampilan tersebut meliputi berbagai kepandaian: bercocok tanam, menulis dan membaca tulisan dan aksara Simalungun. Sangat dibanggakan kalau seorang warga, aparat kerajaan melakukan pembangunan yang dapat digunakan orang lain. Istilah demikian

sapangambe manoktok hitei haganupan simadasi, artinya satu orang menunjukkan atau membuat jalan, banyak orang yang merasakannya (MD Purba 1980).

Selain itu juga sifat kepribadian beliau meliputi: iman yang kuat, rendah hati, suka bermusyawarah, Sesuai antara perkataan dan perbuatan, Berbuat untuk rakyat, anti kepada penindasan, sakti, dan dekat kepada rakyat. Berdasarkan sifat yang dimiliki beliau maka beliau diberi gelar Sang Naualuh, yaitu raja yang mempunyai delapan motto hidup.

Dengan mengetahui sejarah, dan filosofi hidup dari sosok pemimpin Raja Sang Naualuh Damanik, sudah selayaknya pada saat ini masyarakat Kota Pematangsiantar memberikan apresiasi kepada kepribadian beliau yang dapat dijadikan sebagai motto hidup, dan merupakan kearifan lokal di wilayah Kota Pematangsiantar dan juga Kabupaten Simalungun. Sifat kepribadian tersebut pantas untuk diabadikan melalui bukti nyata, yaitu antara lain:

1. Mendirikan Monumen Raja Sang Naualuh Damanik sebagai monumen Kota Pematangsiantar, bagian dari masyarakat Kota Pematangsiantar, dan ini sebagian dari upaya pelestarian nilai dan kerarifan lokal seorang tokoh yang masih aktual.
2. Sejarah perjuangan yang telah dilakukan beliau pantas untuk diwariskan secara formal melalui buku pelajaran dan dijadikan sebagai modul bahan ajar pada kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, sampai Perguruan Tinggi di Kota Pematangsiantar.
3. Secara teratur atau periodik, sudah sepantasnya dilakukan berbagai kegiatan diskusi atau seminar di kalangan para pendidik, guru IPS, Sejarah, PKn, dalam rangka mendekatkan mereka terhadap pahlawannya, yang dilaksanakan saat menjelang Hari Jadi Kota Pematangsiantar, Hari Pahlawan 10 November, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus atau yang diprogramkan lainnya.

Pengaruh Kolonialisme Belanda Terhadap Eksistensi Kerajaan Siantar

Kerajaan Siantar yang berada di wilayah Simalungun, Sumatra Timur, awalnya berdiri sebagai kekuatan politik

tradisional yang mandiri. Sebelum masuknya Belanda, kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan adat yang kuat dan dihormati

rakyatnya. Namun, sejak pertengahan abad ke-19, ekspansi kolonial Belanda mulai mengikis kedaulatannya.



Gambar 3: Kepala Dinas Pendidikan Pematangsiantar dan Narasumber bersama peserta (dokumen panitia)

Dengan memakai dua lensa teori: yakni Frantz Fanon: Kolonialisme bukan hanya menaklukkan fisik, tetapi juga pikiran dan identitas rakyat terjajah (Fanon 1961). Antonio Gramsci: Kekuasaan kolonial bertahan bukan hanya lewat kekerasan, tetapi dengan membangun hegemoni – mengajak elite lokal untuk 'setuju' pada aturan kolonial, sehingga rakyat menerima penjajahan tanpa perlawanan terbuka. Kedua pendekatan ini membantu memahami bahwa penjajahan Belanda di Siantar bukan sekadar soal perang, tetapi strategi mempengaruhi pikiran dan tatanan sosial (Gramsci 1971).

Kerajaan Siantar sebelum masuknya kolonialisme Belanda merupakan salah satu dari empat kerajaan di Simalungun (*harajaon maroppat*), yakni: Siantar, Panei, Dolog Silou, dan Tanah Jawa. Masing-masing raja memerintah sesuai adat, dibantu pejabat-pejabat adat. Kekuasaan raja lahir dari kesepakatan adat, bukan paksaan. Raja Siantar pertama diyakini Namartuah Damanik, masih merupakan keturunan Raja Nagur (Mansen Purba 1993).

Pengangkatan raja dilakukan lewat upacara adat (*patappei sihilap*) tanpa campur tangan kekuatan luar. Sistem ini mulai berubah ketika Belanda masuk dan mengatur bahwa pengangkatan raja harus lewat *besluit*

Gubernur Jenderal Belanda. Masuknya Belanda dan strategi hegemoninya dilakukan di wilayah Simalungun, setelah mereka sukses membuka perkebunan tembakau di Deli tahun 1863 (Pelzer 1985).

Lewat Traktat Sumatera (1871), Belanda mulai melirik pedalaman Sumatera Timur. Di Siantar, mereka awalnya tidak langsung menyerang, tetapi melakukan kooptasi: menjalin perjanjian politik, menawarkan pengakuan resmi pada raja, dan menjanjikan adat tetap berjalan. Namun, ini adalah strategi dominasi halus. Secara hukum, raja tetap berkuasa, tapi legitimasi mereka kini bergantung pada Belanda (Reid 2007).

Sang Nauluh Damanik naik tahta tahun 1888 di usia 17 tahun. Meski Belanda mengesahkan penobatannya, ia tidak mau tunduk sepenuhnya. Ia menolak pajak kolonial, menolak campur tangan administrasi, dan mempertahankan hak-hak ekonomi tradisional. Namun Belanda menganggapnya membangkang. Tekanan makin besar setelah upaya penghapusan hak-hak tradisional raja. Sang Nauluh ditangkap pada 1906, diasingkan ke Bengkalis, dan wafat di sana tahun 1913. Ia menjadi simbol raja yang tidak mau dijadikan boneka kolonial (Juwono 2009).

Setelah Sang Nauluh disingkirkan, Belanda membentuk *Afdeeling Simaloengoen en Karolanden* (1906) dan memaksa raja-raja Simalungun menandatangani ulang *Korte Verklaring* (1907). Raja tetap ada, tetapi fungsinya berubah menjadi pegawai pemerintah kolonial dengan gaji tetap. Hak-hak tradisional dipangkas. Belanda juga mendirikan *Hollandsch Inlandsche School (HIS)* untuk anak-anak bangsawan, mendidik mereka dalam bahasa Belanda, tata pemerintahan, dan nilai-nilai kolonial. Generasi baru bangsawan ini menjadi perantara antara rakyat dan pemerintah kolonial (Tideman 2009).

Pada tahun 1917, Belanda mengubah pusat Kerajaan Siantar menjadi *Gemeente* (Kotamadya) yang dikelola pejabat kolonial. Dewan Kota (*Gemeenteraad*) didominasi orang Eropa, dan anggota lokal hanya formalitas. Kota ditata dengan pemisahan ruang untuk memperkuat kontrol. Perubahan ini menggeser makna kota dari pusat kedaulatan raja menjadi pusat kendali kolonial (Meindersma 1938).

Kolonialisme Belanda di Siantar berlangsung lewat kombinasi kekerasan dan persetujuan: Kooptasi elite, dimana Raja dibuat bergantung pada gaji dan pengakuan Belanda; penghapusan hak tradisional yakni sumber daya dialihkan ke kas kolonial; pendidikan ideologis dimana anak-anak bangsawan menjadi administrator kolonial; serta reorganisasi ruang dengan mengatur Kota Pematangsiantar untuk kepentingan Belanda. Sang Nauluh menjadi pengecualian, menolak tunduk dan mempertahankan martabat kerajaan. Kisah ini membuktikan bahwa hegemoni kolonial tidak selalu total, dan perlawanan bisa tetap hidup meski dalam tekanan.

Peluang dan Tantangan Raja Sang Nauluh Menjadi Pahlawan Nasional

Kajian tentang tokoh lokal dalam historiografi Indonesia semakin memperoleh tempat penting, terutama sejak berkembangnya pendekatan sejarah lokal dan sejarah dari bawah. Dalam konteks ini, sosok Raja Sang Nauluh Damanik menjadi salah satu figur yang banyak diperbincangkan. Raja Sang Nauluh dikenal sebagai pemimpin yang

menolak hegemoni kolonial Belanda, menegakkan martabat bangsanya, dan mempertahankan identitas budaya Simalungun.

Namun pengakuan formal sebagai Pahlawan Nasional hingga kini belum diperoleh, meskipun usulan sudah pernah diajukan dua kali, yaitu pada tahun 2017 dan 2019. Pertanyaan yang muncul ialah: sejauh mana peluang dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut? Melalui seminar ini kembali dicoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pengusulan Raja Sang Nauluh sebagai Pahlawan Nasional dalam perspektif politik sejarah dan kebijakan negara.

Penetapan gelar Pahlawan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Tanda Jasa, Gelar dan Tanda Kehormatan (Presiden 2009), kriteria Pahlawan Nasional setidaknya mencakup:

1. Jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan dan kebangsaan.
2. Integritas moral dan keteladanan.
3. Pengakuan masyarakat luas dan tidak tercela.
4. Relevansi nilai perjuangan dengan konteks kebangsaan.

Dari perspektif historiografi, seperti yang dikemukakan Sartono Kartodirdjo, tokoh lokal seringkali menghadapi kendala karena dokumentasi perjuangan mereka lebih banyak hidup dalam tradisi lisan ketimbang sumber tertulis kolonial (Kartodirdjo 1992). Akibatnya, pengakuan resmi kerap tertunda karena lemahnya bukti administratif dibandingkan tokoh lain yang tercatat dalam arsip kolonial.

Oleh karena itu, pengusulannya harus senantiasa menggunakan pendekatan sejarah politik dan kebijakan publik, yakni dengan melihat proses pengusulan pahlawan nasional bukan hanya sebagai wacana akademis, melainkan juga bagian dari konstruksi identitas bangsa yang melibatkan dinamika politik, birokrasi, serta representasi daerah (Adam 2006).

Nilai historis dan nasionalisme lokal Raja Sang Nauluh Damanik yakni menolak intervensi Belanda dalam urusan kerajaan serta berusaha mempertahankan martabat

bangsanya dari dominasi kolonial. Perjuangannya tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga sejalan dengan arus nasionalisme awal di berbagai daerah Indonesia. Dalam kerangka nasional, tokoh-tokoh dengan basis perlawanan lokal sudah banyak diakui, termasuk yang berasal dari Sumatera Utara seperti Raja Sisingamangaraja Ke XII dan Kiras Bangun. Hal ini tentunya juga memberi peluang serupa bagi Raja Sang Nauluh.

Dukungan sosial dan akademis dari Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, akademisi, sejarawan, serta komunitas adat telah aktif mendorong pengusulan. Dukungan masyarakat Pematangsiantar, Simalungun dan Sumatera Utara sangat penting dalam rangka menunjukkan pengakuan kolektif terhadap jasa salah seorang tokohnya. Penelitian-penelitian baru, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun arsip kolonial yang dikaji ulang, semakin memperkuat basis historis usulan ini

Berdasarkan regulasi, usulan untuk menjadi pahlawan nasional dapat dilakukan berulang kali tanpa batasan jumlah. Artinya, meskipun belum berhasil dua kali disulkan, tahun 2017 dan 2019, peluang mengajukannya kembali masih terbuka. Tentunya dengan data dan informasi yang lebih lengkap, berupa arsip kolonial yang ditulis sezaman dengan masa kehidupan Sang Nauluh. Arsip kolonial sebagai dokumen primer tentang kiprah Raja Sang Nauluh Damanik merupakan hal yang perlu diungkapkan lebih mendalam. Tradisi lisan yang berkembang di masyarakat dapat menjadi perekat dengan sumber kolonial untuk menguatkan dari sisi akademik dan metodologi historis (Kartodirdjo 1999).

Pertimbangan lainnya adalah persaingan usulan dari daerah lain, dimana setiap tahun pemerintah pusat menerima banyak usulan tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Proses seleksi menjadi sangat ketat, dan hanya tokoh dengan dokumentasi lengkap, dukungan politik yang luas, serta relevansi nasional kuat yang diprioritaskan (Adam 2005). Aspek representasi dan politik memori penetapan pahlawan nasional tidak sepenuhnya netral secara akademis. Ada faktor representasi daerah, keseimbangan

distribusi tokoh dari berbagai etnis, serta kepentingan politik identitas yang ikut mempengaruhi keputusan (Purwanto 2017).

Kurangnya popularisasi figur dalam skala nasional juga kerap jadi pertimbangan. Sosok Raja Sang Nauluh masih relatif kurang dikenal di luar Sumatera Utara. Popularisasi melalui seminar nasional, publikasi buku, film dokumenter, maupun integrasi dalam kurikulum lokal dan nasional akan sangat membantu mengangkat namanya ke tingkat kesadaran publik yang lebih luas (Sugiarto 2018).

Proses pengusulan Raja Sang Nauluh sebagai Pahlawan Nasional merefleksikan dinamika hubungan antara sejarah lokal, kebijakan negara, dan politik memori bangsa. Dari sisi peluang, Raja Sang Nauluh memiliki nilai historis yang kuat, dukungan sosial yang luas, serta ruang terbuka karena regulasi tidak membatasi jumlah pengajuan (Kemensos 2012). Namun, dari sisi tantangan, terdapat kendala berupa keterbatasan sumber tertulis, persaingan antar-usulan, representasi politik identitas, dan kurangnya popularisasi tokoh di level nasional.

Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memperkuat basis historiografi melalui riset akademis yang lebih mendalam, memperluas jaringan dukungan lintas daerah, serta meningkatkan popularisasi figur Raja Sang Nauluh di tingkat nasional. Dengan demikian, peluang pengakuan sebagai Pahlawan Nasional dapat semakin besar terwujud.

Rencana Tindak Lanjut Seminar

1. Penyusunan dan penyebaran materi ajar berbasis sejarah lokal, termasuk profil perjuangan Raja Sang Nauluh Damanik dalam bentuk modul, infografis, dan video pembelajaran.
2. Penguatan kampanye literasi sejarah lokal di sekolah melalui lomba menulis sejarah lokal, diskusi siswa, dan kunjungan edukatif ke situs-situs sejarah. Selain itu, diharapkan pembentukan kembali Tim Pendukung Usulan Gelar Pahlawan Nasional yang melibatkan akademisi, tokoh adat, dan pegiat budaya.
3. Pelaksanaan seminar lanjutan atau diskusi publik di berbagai tingkatan (sekolah,

komunitas, kampus) untuk menjaga kesinambungan advokasi.

4. Pelibatan media lokal dan nasional untuk menyuarakan nilai penting perjuangan Sang Nauluh Damanik dalam narasi sejarah Indonesia.

SIMPULAN

Seminar ini menegaskan pentingnya akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah lokal sebagai basis pembentukan identitas bangsa dan sarana pelestarian warisan budaya. Melalui seminar yang berfokus pada kiprah Raja Sang Nauluh Damanik, tampak bahwa literasi sejarah tidak hanya relevan dalam ranah akademis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penguatan memori kolektif masyarakat.

Perjuangan Sang Nauluh menolak hegemoni kolonial dan mempertahankan martabat bangsanya menempatkannya sejajar dengan tokoh-tokoh lokal lain yang telah diakui sebagai Pahlawan Nasional. Meski pengusulannya sudah pernah dilakukan dan belum berhasil, peluang tetap terbuka berkat regulasi yang tidak membatasi jumlah pengajuan. Dukungan sosial, akademik, dan politik lokal memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan advokasi ini.

Namun, tantangan berupa minimnya dokumentasi tertulis, dominasi narasi kolonial dalam arsip resmi, serta keterbatasan popularisasi figur Sang Nauluh di tingkat nasional masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, strategi lanjutan yang harus ditempuh adalah memperkuat riset akademis, mengintegrasikan kisah Sang Nauluh dalam kurikulum pendidikan, serta meningkatkan publikasi dalam berbagai media untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Dengan demikian, perjuangan Sang Nauluh tidak hanya dikenang sebagai memori lokal, tetapi juga diakui sebagai bagian dari sejarah nasional Indonesia. Oleh karena itu, membuka akses terhadap informasi sejarah lokal merupakan langkah strategis untuk membangun kesadaran historis, memperkuat identitas kebangsaan, serta mendorong pengakuan formal terhadap tokoh-tokoh lokal yang berkontribusi besar dalam perjuangan melawan kolonialisme.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dan seluruh Kepala SMP Negeri dan Swasta di Lingkungan Kota Pematangsiantar, para cendekiawan dan tokoh adat Simalungun, pegiat budaya, pengelola Museum Simalungun dan perwakilan masyarakat lintas etnik yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat Universitas Simalungun, sehingga apa yang telah disampaikan dalam seminar ini berhasil guna bagi para peserta dalam peningkatan dan pengembangan wawasan tentang Raja Siantar Ke XIV, Sang Nauluh Damanik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Warman. 2005. *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Adam, Asvi Warman. 2006. *Sejarah Lokal dalam Perspektif Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Damanik, Erond L; Juandaha Raya Purba Dasuha. 2011. *Kerajaan Siantar: Dari Pulau Holang ke Kota Pematangsiantar*. Medan: Simetris Institut.
- Fanon, Frantz. 1961. *The Wretched of the Earth*. Grove Press.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Hutauruk, A. F., Harmain, U., Ginting, A. M., Salsabila, S., Saragih, D. M., & Dabukke, L. (2023). *Sosialisasi Pentingnya Mendirikan Museum Teh Di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Sebagai Sarana Eukasi Bagi Masyarakat*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(2), 125-131
- Jovanda, R., Girsang, S. E. E., Syahfitri, N., Ambarwangi, W., Rahayu, H., Hidayat, M. N., ... & Gilbert, T. G. (2025). *Pelestarian Budaya Basa Aksara Simalungun Melalui Kegiatan Literasi Di SMA Negeri 2*

- Pematangsiantar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 5(1), 131-138
- Juwono, Djoko Marihandono; Harto. 2009. Sejarah Perlawanan Masyarakat Simalungun Terhadap Kolonialisme: Perlawanan Sang Nahualu. Bogor: Akademia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. Rakyat dan Negara: Evolusi Historis Modernisasi Politik. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kemensos. 2012. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional. Indonesia.
- Meindersma, G.W. 1938. Memorie van Overgave van den Simaloengoen en de Karolanden. 7 October 1938. Pematangsiantar.
- Pelzer, Karl J. 1985. Toeian Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947. Jakarta: Sinar Harapan.
- Prayitno, G., Wahyuni, S., Iyati, W., Tarno, H., Hayat, A., Fauziah, S. H., & Hasna, F. (2024). Pendampingan Penyusunan Desain Museum Desa Pertanian Karangpatihan: Integrasi Wisata Edukatif dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 4(2), 287-302
- Presiden, Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Indonesia.
- Purba, Mansen. 1993. Rondahaim: Sebuah Kisah Kepahlawanan Menentang Penjajahan di Simalungun. Medan: Bina Budaya Simalungun.
- Purba, MD. 1980. Mengenal Sang Nauluh Sebagai Pejuang. Medan: MD.Purba.
- Purwanto, Bambang. 2017. Gagalnya Historiografi Nasional. Yogyakarta: Ombak.
- Reid, Antony. 2007. Asal Mula Konflik Aceh. Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19. Jakarta: Obor.
- Saragih, H. (2022). Sosialisasi Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Di Kota Pematangsiantar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 2(2), 94-102
- Sugiarto. 2018. "Tokoh Lokal dan Konstruksi Identitas Nasional." Jurnal Sejarah dan Budaya 10(2).
- Tideman, Jan. 2009. Simalungun: Tanah Batak Timur dalam Keterasingan dan Perkembangannya Menjadi Bagian dari Daerah Perkebunan Pantai Timur Sumatra (Terjemahan, Djoko Marihandoko dan Harto Juwono). Jakarta: Frans Purba.